RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

SKRIPSI

Oleh:

DYMAS YULIA PUTRI K
NIM 09220055

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

SKRIPSI

Oleh:

DYMAS YULIA PUTRI K
NIM 09220055

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 4 April 2013
Penulis,

Dymas Yulia Putri K
NIM 09220055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Dymas Yulia Putri Kusumaning Tyas, NIM 09220055, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah-Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2013

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 195003241983031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, NIM 09220055, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2013
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 195003241983031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi mahasiswa yang bernama Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, NIM 09220055, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2009, dengan judul:

RESPONS BANK SYARIAH KOTA MALANG TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dengan penguji:

1) Dr. Fakhruddin, M.H.I. (_____)
   NIP 197408192000031002 (Sekretaris)

2) Dr. Suwandi, M.H. (_____)
   NIP 196104152000031001 (Ketua)

3) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. (_____)
   NIP 195003241983031002 (Penguji Utama)

Malang, 22 Juni 2013

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada:

Ayahanda H. Koestadji., S.H dan Ibunda Dra. Hj. Dyah Ediyati, M.Pd.

Inspirator dan motivor yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah swt senantiasa menjaga dan menyayangi beliau lebih dari kasih sayang yang beliau curahkan secara lahir batin kepada penulis. (Mam, Pi…both of you are the greatest marvel in my life and I love you so much ^_^)

Mbak dan adek yang penulis sayangi dan cintai: mbak Kus Eka Erna Rohana dan Dek Raharwindy Kharisma Sudrajat, yang dengan sangat tidak sabarnya menunggu kelulusan penulis. Serta ponakan-ponakanku, Danial dan Saqief, senyum, tawa dan kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat perjuanganku.

Sahabat, kakak, dan partner yang selalu ada, Erwin Prasetyo Utomo. Terimakasih atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya. Semoga kita terus dapat berjuang bersama-sama untuk menaklukkan dunia. (we are the Queen and King of the world).

MOTTO

ليس الفتى من يقول كان أبى # ولكن الفتى من يقول هأناذا

Artinya: bukanlah seorang pemuda yang

mengatakan “beginilah ayahku”,

akan tetapi seorang pemuda adalah yang berkata

“inilah aku”.

PRAKATA

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, lâ haula walâ quwwata illâ billahil 'aliyyil adhzim, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)* dapat penulis susun dan selesaikan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah hamba Allah swt yang benar dalam ucapan dan perbuatannya yang diutus Allah swt sebagai pelita dari kegelapan dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau dihari akhir kelak. *Amiin amiin yaa Rabbal alamiin*

Penyusunan skripsi ini, merupakan wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang penulis peroleh selama masa perkuliahan Strata 1 (S1). Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. *Syukron Katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah swt, serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Teriring doa kepada Allah Swt, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk mendukung skripsi ini demi kesempurnaan skripsi ini, menambah khazanah keilmuan penulis, dan memberikan kontribusi keilmuan di dunia bisnis Syariah.

Malang, 4 April 2013

Penulis,

Dymas Yulia Putri K
NIM 09220055

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص = sh ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	*qawlun*
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	*khayrun*

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…

Al-Bukhâriy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan...

Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun

Billâh 'azza wa jalla

Nama dan Kata Arab terIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (AS)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 021/BAN-PT/ Ak-XIV/SI/VIII/2011 (HBS)
Jl. Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faks. (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas

NIM : 09220055

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Judul Skripsi : Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	5 November 2012	Proposal Skripsi	1.	
2	26 Desember 2012	Revisi Proposal Sebelum Seminar Proposal Skripsi dan Acc		2.
3	14 Januari 2013	Revisi proposal pasca Seminar Proposal Skripsi	3.	
4	25 Februari 2013	BAB I, II dan III		4.
5	28 Maret 2013	BAB IV dan V	5.	
6	4 April 2013	Acc BAB 1, II, III, IV dan V		6.

Malang, 5 April 2013
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. Suwandi., M.H.
NIP 196104152000031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
PRAKATA viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
BUKTI KONSULTASI xv
DAFTAR ISI xvi
ABSTRAK xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu 12
B. Definisi Operasional 19
C. Bank Syariah 20
   1. Sejarah Bank Syariah 20
   2. Landasan Hukum Bank Syariah 24
   3. Sistem Operasional Bank Syariah 29
   4. Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Produk Perbankan Syariah 46
D. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah 53
   1. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama di Indonesia 53
   2. Asas-Asas Hukum Pengadilan Agama 55
   3. Kewenangan Pengadilan Agama 69
   4. Ruang Lingkup dan Jangkauan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah 85

E. Tinjauan Proses Penyelesaian Sengketa 99
1. Proses Adjudikatif 99
2. Proses Konsensual (Consensual Processes) 102
3. Proses Adjudikatif Semu 109
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH 113
A. Proses Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama 114
1. Penyelesaian Melalui Proses Perdamaian 116
2. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan 132
B. Musyawarah-Mufakat 139
C. Mediasi Perbankan 139
D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 142
BAB IV METODE PENELITIAN 151
A. Jenis Penelitian 151
B. Pendekatan Penelitian 152
C. Lokasi Penelitian 153
D. Jenis dan Sumber Data 154
E. Metode Pengumpulan Data 156
F. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 158
G. Metode Analisis Data 160
BAB V RESPONS BANK SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH 162
A. Profil Bank Syariah 162
1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 162
2. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah 164
3. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah 166
B. Aplikasi Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah 169
1. Proseder Penyelesaian Sengketa BMI 169
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa BTN Syariah 171
3. Prosedur Penyelesaian Sengketa BNI Syariah 173

C. Respons Bank Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 175
1. Melalui Proses Adjudikatif 179
1.1. Jalur Pengadilan Agama 179
1.2. Jalur Pengadilan Negeri 182
1.2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 183
2. Melalui Proses Konsensual 185
2.1. Jalur Musyawarah-Mufakat 185
2.2. Jalur Mediasi Perbankan 186
D. Latar Belakang Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 187
1. Pendapat Penambih Bambang Setijono (BMI) 188
2. Pendapat Tanti Widia (BTN Syariah) 189
3. Pendapat Ainul Yaqin (BNI Syariah) 190
E. Analisis Persinggungan Kewenangan Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 191
BAB VI PENUTUP 199
A. Kesimpulan 199
B. Saran 206
DAFTAR PUSTAKA 208
A. Jurnal Kepustakaan 208
B. Jurnal Penelitian 210
C. Peraturan Perundang-Undangan 211
D. Website 211

ABSTRAK

Yulia Putri Kusumaningtyas, Dymas. 09220055. 2013. *Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).* Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Respons, **Bank Syariah Kota Malang**, **Kewenangan Pengadilan Agama**, **Penyelesaian sengketa**, **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

Terjadinya sengketa industri Perbankan Syariah di Indonesia tidak akan dapat dihindari, untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi Syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama, akan tetapi, dalam Pasal ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan juga respons mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif.

Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. *Pertama,* semua Bank Syariah yang menjadi objek dalam skripsi ini merespons baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga *intermediary financial* yang berorientasi untuk

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi, tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. *Kedua,* mengenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), berdasarkan pendapat praktisi Bank Syariah dikarenakan beberapa hal: (1). Dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan; (2). Undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan; (3). Dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri; (4). Dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yang sama untuk seluruh golongan masyarakat.

ملخص البحث

يولي فترى كوسوما ننجتياس بنت كوستاجى, ديماس. 09220055. 2013. *رد بنك الشريعة فى مدينة مالاج عن السلطة المحكمة الدينية فى قطاع لتسوية المنازعات العمليات المصرفية الإسلامية (النظر فى المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2008عن العمليات المصرفية الإسلامية)*. بحث جامعى. شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكمية مولان مالك إبراهم بمالاج. المشرف: الدكتور الحاج دهلان تمرين, .M.Ag

الكلمات الرئيسية: رد على, بنك الشريعة, سلطة المحاكم الدينية, تسوية المنازعات, فى المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2008عن العمليات المصرفية الإسلامية.

فإن وجود الخلاف فى الصناعة المصرفية الشريعة هي أمرا لا مفرا منه, و لذلك من المادة 49 (i) من القانون الرقم 3 لسنة 2006, منحت المحكمة الدينية سلطة لتسوية المنازعات فى الإقتصادية لأن يعتبر لديه وكالة إنفاذ القانون الذى فهم عن مبادئ الشريعة الإسلامية و أيضا ينظم فى المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2008 ولكن فى هذه المادة وجدت دليلا يدل على تناقس فى تحديد السلطة المطلقة فى المحكمة الدينية فى المادة 49 نقطة (i).

المشكل التى تمت مناقشتها فى هذا بحث الجامعى هو إستجابة من ممارسى ثلاثة البنوك فى المدينة مالانج عن تسوية المنازعات فى المصرفية الشريعة التى تتلخص فى المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2008, وكذالك إستجابة عن تقاطع السلطة بين المحكمة الدينية و محكمة الجزئية (عامية) كما هو ملخص فى تفسير المادة 55 فقرة (2). نوع من البحوث التى تستخدم فى هذا البحث الجامعى هو من البحث الميدانى الذى معتمد من قبل بالبحث فى المكتبه و استنادا إلى قانون عن المصرفية الإسلامية. و جمع البيانات من خلال الملاحظة و المقابلة و الوثائق باستخدام أوصاف النوعى لتحليل

وفى النهاية هناك النتائج فى هذا البحث يعنى أستطيع أن أستنتج من الكتاب كمايلى: *أولا*, كل البنوك فى هذا البحث قد تستجيبوا بشكل جيد عن التسوية المنازعات فى المصرفية الشريعة تحت المادة 55 الفقرة (1) و (2) من القانون رقم 21 سنة 2008 عن المصرفية الشريعة لأن فى أداء وظائفهم كما بانى الإقتصاد الوطنى, تريدوا بالتأكيد على طاعة كل الأنظمة التى تدعم التشغيلية و الأعمال التجارية و المؤسسية للبنك. وعلى الجانب الآخر, المصرفية الشريعة هى أيضا المؤسسات الوساطة المالية التى موجهة لإستفادة بقدرالإمكان لتقليل المخاطر التى هناك سيتم ذات الأولوية بشكل فعال و إجراءات تسوية المنازعات بكفاءة. *ثانيا*, فيما يتعلق بتقاطع السلطة بين المحكمة الدينية و المحكمة الجزئية الذى ينشأ من تفسير المادة 55 فقرة (2) بالأسباب كمايلى: (أ). لأن إستعداد قضاة المحكمة الدينية لازالوا تشكون على طالب العدالة, (ب). و يتم إصدارالقوانين الذى تدعم الصفقة من المنتجات المصرفية الإسلامية قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 2006 كمثل القنون رقم 42 لسنة 1999 عن الائتمانية لم يتم بتعديل. (ت). لأن إستمرار وحدة الأعمال الشريعة كفرع الديوان

من فروع البنك التقليدى الذى يريد التطبيق المبادئ الشريعة الإسلامية ومن حيث قانونه و لا يزال تسترشد البنك عهدت إلى المسائل التقليدية لتسوية المنازعات إلى المحكمة الجزئية (العامية). (ث). أن ثنائية السلطة رتبت للحريات العملاء التحديد العلاج الموثوق به.

ABSTRACT

Yulia Putri Kusumaningtyas, Dymas. 09220055. 2013. *Malang Sharia Bank Response on The Religious Court's Authority in the Sector of Sharia Banking Dispute Resolution (Consideration of Article 55 of Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking).* Thesis. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Keywords: Response, **Malang Sharia Bank**, **the Religious Court's Authority**, **Dispute resolution**, **Article 55 of Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking**.

The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law Number 7 of 1989 on Religious Court's, Religious Court's grantes the authority to be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the religious court because that agency considered has the law enforcement which understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court's in Article 49 point (i).

The problems which are discussed in this thesis is a response from practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also the response of the intersection authority between Religious Courts and District Court's (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2). Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And data collection through the observation, interviews, and documentation by using qualitative descriptions of data analysis.

At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. *First,* both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking because in performing they's functions as the national economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side, Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority

effectively and efficiently dispute resolution procedures. *Second,* regarding the intersection authority between Religious Court's and the District Court's (General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The Religious Court's judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court's (General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of society.